



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HARYATI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. NHK : 240369

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.528.474.136

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/137 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 360.880.000
2. Tanah Seluas 516 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 316.824.000
3. Tanah Seluas 1.770 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 697.380.000
4. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 72.459.000
5. Tanah Seluas 2.005 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.231.070.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 959.200.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/108 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.890.661.136

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 463.750.000

1. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BRXLBD 2.0 G HV CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 463.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 108.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 951.708.580

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.107.155



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.201.639.871

III. HUTANG

Rp. 2.044.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.157.639.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.